Suara Merdeka
1
KAMIS, 14 APRIL 2016

# Kasus Siyono Masuk Pelanggaran HAM

**YOGYAKARTA** - Tim Pembela Kemanusiaan yang beranggotakan LBH Yogyakarta, PKBH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, PKBH Universitas Ahmad Dahlan, PKBH Universitas Muhammadiyah Surakarta, PUSHAM UII, PAHAM DIY, Forum LSM, ICM, LBH Kadin DIY, serta LBH Baskara PM DIY meminta Komnas HAM dan kepolisian menindaklanjuti kasus Siyono.

Perwakilan Tim Pembela Kemanusiaan dan juga merupakan Dekan Fakultas Hukum UMY Dr Trisno Raharjo SH MHum mengatakan, hal itu di Pusham UII, kemarin. Dia menyatakan kasus tersebut sebagai pelanggaran HAM.

"Berdasar hasil temuan autopsi, terdapat berbagai bukti-bukti yang menguatkan pembunuhan Siyono. Atas itu, kami meminta Komnas HAM menjadikan kasus itu sebagai pelanggaran HAM. Salah satunya, berdasarkan bukti hasil autopsi," papar Trisno.

(Bersambung hlm 7 kol 1)

## Kasus...

(Sambungan Hal1 )

Menurut hasil autopsi yang telah dilakukan terdapat tanda-tanda penyimpangan pembusukan berupa lilin mayat (saponifikasi), terdapat luka akibat pemukulan benda tumpul yang menyebabkan memar pada beberapa bagian tubuh.

**Langgar Pidana**

"Pada pemeriksaan mikroskopis didapatkan tanda kerusakan jaringan tubuh secara intravital, sehingga menyebabkan patah tulang dada dan tulang iga yang menyebabkan kerusakan organ dalam rongga dada sehingga menyebabkan kematian," jelasnya.

Selain berdasarkan bukti autopsi, terdapat bukti-bukti penguat salah satunya, Rp 100 juta yang diberikan kepada istri almarhum Siyono. Bukti-bukti untuk menguatkan kasus tersebut menjadi pelanggaran HAM sangat kuat.

Pihaknya telah menyiapkan surat permintaan kepada Kapolri untuk menjadikan perkara ini tidak hanya melanggar etik, melainkan juga melanggar pidana dan proses hukum tetap berjalan.

Tim TPK meminta kepada pihak kepolisian untuk tetap independen dalam menjalankan perkara meskipun yang diduga terlibat tidak lain adalah anggota kepolisian.

Di sisi lain, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Tito Karnavian menyatakan tidak mempersoalkan Rp 100 juta yang diberikan Komandan Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri Brigadir Jenderal Eddy Hartono kepada keluarga Siyono. Bagi Tito yang pernah bertugas di Densus 88, hal tersebut wajar.

"Tidak menjadi soal. Bisa saja, Kadensus yang Brigjen, punya anggaran, punya gaji juga luma- saja," kata Tito di kompleks Parlemen, Senayan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, kemarin.

Menurut Tito yang mantan Kapolda Metro Jaya, dari 121 terduga teroris yang meninggal, hanya sebagian keluarga yang diberi uang kemanusiaan dari Densus 88. Namun bagi keluarga terduga teroris yang secara ekonomi sudah mapan, tidak diberikan uang kemanusiaan.

"Tidak semua dikasih uang itu. Ada yang dikasih, ada yang tidak, kalau yang keluarga punya uang ya enggak perlu. Ini kan kemarin keluarganya Siyono datang ke Jakarta, saya dapat informasi seperti itu. Juga butuh banyak biaya lainnya. Ada biaya untuk perjalanan, biaya pemakaman, ambulans, ada yang tinggal di Jakarta, mereka makan segala macam kan kasihan. Prinsipnya kalau diterima syukur, kalau nggak diterima ya ditolak saja sejak awal," papar Tito.

Sementara itu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, kemarin, Tito meminta DPR dan seluruh elemen masyarakat proporsional dalam menilai Densus 88. Jangan hanya terus memojokkan bahkan menuntut pembubaran Densus 88. Menurut Tito, Densus 88 harus dihargai keberadaannya, karena mereka berjuang untuk menjaga keamanan NKRI dari ancaman teroris.

Selain itu, Tito juga menuturkan, tugas anggota Densus 88 saat bertugas di Poso sangat berat. Mereka bekerja bertaruh nyawa karena menjadi target teroris, dan dengan renumerasi tidak sebanding dengan risikonya.

"Hanya remunerasi Rp 2 juta/bulan. Teman-teman di Densus 88 tetap bekerja. Tolong ini dipahami betul, agar proporsional menilai. Juga banyak anggota Densus yang harus bercerai karena keluarga yang mereka tinggalkan sekian lama, tidak kuat juga mene-

anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi'i mempertanyakan alasan BNPT mengidentikkan teroris dengan Islam.

"Kenapa teroris selalu saja dikesankan diidentikan dengan Islam. Saya sudah puluhan tahun menjadi ustads tidak ada ajaran Islam yang mengajak menjadi teroris. Kalau Islam teroris, Majelis Ulama merupakan sarang teroris. Kita lihat saja dari 31 MoU BNPT, sebanyak 16 MoU dibuat bersama Kementerian dan lembaga. Sisanya, 15 bersama organisasi Islam. Hal ini kan seolah sebuah bukti bahwa BNPT menganggap Islam identik dengan teroris," kata anggota Fraksi Gerindra DPR tersebut.

Maka dia meminta adanya ketegasan BNPT terkait definisi teroris. Hal ini sangat berguna untuk membantu menyosialisasikan ke masyarakat agar tidak terlibat dalam tindak teroris, dan tidak mengesankan teroris dengan agama tertentu, karena pelaku teroris bisa dilakukan dengan orang berlatarbelakang agama manapun, maupun yang atheis.

**121 Korban**

Selain itu, dia juga meminta agar ada kejelasan *standard operational procedur* Densus 88 untuk menembaki orang yang diduga teroris. Agar tidak muncul korban meninggal dunia sebelum menjalani proses pengadilan.

"Menurut data Komnas HAM yang disamaikaan ke Komisi III Selasa lalu, ada 121 orang yang diduga teroris mati tanpa proses pengadilan. Ini menyedihkan sekali. Maka kami minta jangan ada lagi hal yang seperti ini. Untuk itu perlu kejelasan SOP untuk menembak mereka yang diduga teroris," tegas dia.

Syafi'i merasa perlu untuk mengingatan hal tersebut karena bila banyak terduga teroris yang meninggal tanpa menjalani proses pengadilan, maka hal itu justru